



**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAERAH TERHADAP  
NILAI INFORMASI LAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH  
(Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah  
di Kota Binjai)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

**NURBAIDAH HANUM  
NPM 1415100046**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2019**

107-19  
14

Aeo Sidang Skripsi

13/05  
- 2019  
DPTI



**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAERAH TERHADAP  
NILAI INFORMASI LAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH  
(Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah  
di Kota Binjai)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

**NURBAIDAH HANUM**  
NPM 1415100046

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2019**



Ace Seminar Proposal  
Limp 25/08  
-2018

18/8  
-18  
[Signature]

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAERAH TERHADAP  
NILAI INFORMASI LAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH  
(Studi Empiris Pada SKPD di Kota Binjai)**

**PROPOSAL**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

**NURBAIDAH HANUM**  
NPM 1415100046

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2018**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : NURBAIDAH HANUM  
NPM : 1415100046  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
JENJANG : S1 (STRATA SATU)  
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH DAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAERAH TERHADAP NILAI  
INFORMASI LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH (Studi Empiris pada Satuan Kerja  
Perangkat Daerah di Kota Binjai)

MEDAN, Mei 2019

**KETUA PROGRAM STUDI**

(Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

**DEKAN**

(Dr. Surya Nita, SH., M.Hum)

**PEMBIMBING I**

(Drs. Abdul Hasyim BB, AK., M.M)

**PEMBIMBING II**

(Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH  
PANTIA SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

**PERSETUJUAN LAIN**

NAMA : NURBAIDAH HANUM  
NPM : 1415100046  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
JENJANG : S1 (STRATA SATU)  
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH DAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAERAH TERHADAP NILAI  
INFORMASI LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH (Studi Empiris pada Satuan Kerja  
Perangkat Daerah di Kota Binjai)

MEDAN, Mei 2019

KETUA



(Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

ANGGOTA II

(Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si)

ANGGOTA I

(Drs. Abdul Hasyim BB, AK., M.M)

ANGGOTA III

(Irawan, SE., M.Si)

ANGGOTA IV

(Hernawaty, SE., M.M)

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : NURBAIDAH HANUM  
NPM : 1415100046  
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS / AKUNTANSI  
Judul Skripsi : PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH DAN  
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH  
TERHADAP NILAI INFORMASI  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat  
Daerah di Kota Binjai)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi saya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan Mei 2019  
  
METERAI  
TEMPEL  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
NURBAIDAH HANUM

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURBAIDAH HANUM  
Tempat/TanggalLahir : B. Jambu/11 Juli 1996  
NPM : 1415100046  
Fakultas : Sosial Sains  
Program Studi : Akuntansi  
Alamat : Jl. Binjai Km 10,3 Gg. Jadi

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Univeristas Pembangunan Panca Budi Medan.

Sehubungan dengan hal ini, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini, saya perbuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

a, Mei 2019  
Penulis  
  
Nuroaidah Hanum



Hal : Permohonan Meja Hijau



FM-BPAA-2012-041

Medan, 27 Mei 2019  
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
Fakultas SOSIAL SAINS  
UNPAB Medan  
Di -  
Tempat



TEGUH WAHYONG, SE., MM.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :  
Nama : NURBAIDAH HANUM  
Tempat/Tgl. Lahir : B. Jambu / 11-07-1996  
Nama Orang Tua : SADIMAN SAKA  
N. P. M : 1415100046  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Akuntansi  
No. HP : 083194592936  
Alamat : Jl. Binjai KM 10.3 Gg. Jadi

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Binjai). Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 - 5 lembar dan 3x4 - 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 examplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	650.000
2. [170] Administrasi Wfsuda	: Rp.	1.500.000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100.000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	0
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2.250.000</b>
5. UK - 50%	Rp.	2.500.000
		<u>4.750.000</u>

28/05/19  
*[Signature]*

Ukuran Toga : S



Hormat saya  
*[Signature]*  
NURBAIDAH HANUM  
1415100046

- Catatan :
- Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
    - Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
    - Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
  - Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.







# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

## FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

### PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : NURBAIDAH HANUM  
 Tanggal/Tgl. Lahir : / 11 Juli 1996  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100046  
 Program Studi : Akuntansi  
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 127 SKS, IPK 3,39  
 Saya ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul Skripsi	Persetujuan
Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Binjai)	<input checked="" type="checkbox"/>
Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (pada Dinas Pemerintah Kota Binjai)	<input type="checkbox"/>
Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Binjai)	<input type="checkbox"/>

Judul yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda

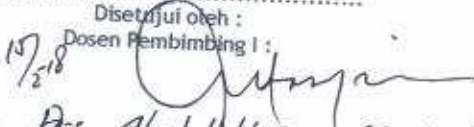
  
 (R. Baakti Alamisyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 25 Januari 2018

Pemohon  
  
 (NURBAIDAH HANUM)

Nomor : .....  
 Tanggal : .....  
 Disahkan oleh :  
  
 (Dr. Surya Nida, S.P., M.Hum.)

Tanggal : 20 Januari 2018  
 Disetujui oleh :  
  
 (Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing I :  
  
 (Dr. Abd. Il. Hasyim, RB. Ak. M. S.)

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing II :  
  
 (Fitriyani Pangaheni, SE. M. S.)

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01

Revisi: 02

Tgl. Eff: 20 Des 2015

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Kamis, 25 Januari 2018 15:42:28



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing I : Drs. Abdul Hasyim, B.S. Ak. MM  
 Dosen Pembimbing II : Fitriyani Panggabean, SE. M.Si  
 Nama Mahasiswa : NURBAIDAH HANUM  
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100046  
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu  
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Binjai)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
2/8-18	Revisi 1 & Surya Tasa		
8/8-18	Revisi		
14/8-18	Revisi		
18/8-18	Acc Pbb		

Medan, 18 Juli 2018

Diketahui/Ditetujui oleh :

Dekan,




Dr. Surya Nifa S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing I : Drs. Abdul Hasim, BP. Ek. MM  
 Dosen Pembimbing II : Fitriyani Panggabean, SE. M. Si  
 Nama Mahasiswa : NURBAIDAH HANUM  
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100046  
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu  
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Binjai)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
20/08 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cover</li> <li>- Kata pengantar</li> <li>- Daftar isi</li> <li>- tabel &amp; Gambar</li> <li>- Sistematisasi penelitian Bab 1-3</li> <li>- Rancangan yg sebanyak 10 tabel (2008)</li> <li>- identifikasi Masalah</li> <li>- Rumusan masalah</li> <li>- Mppis penelitian selanjutnya</li> <li>- kerangka konseptual</li> <li>- hipotesis</li> <li>- tabel spesifikasi penelitian</li> <li>- Operasional variabel</li> <li>- teknik pengumpulan data</li> <li>- Uji asumsi klasik</li> <li>- persamaan regresi</li> </ul>		

- Uji Regresi
- Daftar pustaka
- penulisan ulang
- Surat izin

Medan, 30 Juli 2018  
 Diketahui/Ditetujui oleh :  
 Dekan,

  
 Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing I : Dr. Abdul Hasyim, B.S. Ak. MM  
 Dosen Pembimbing II : Fitriyani Penggabean, S.E. M.Si  
 Nama Mahasiswa : NURBAIDAH HANUM  
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100046  
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu

Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Girari)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
23/08 -2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem akuntansi pemerintah sebagai bab 1-3</li> <li>- <del>ura</del> identifikasi masalah</li> <li>- teori <del>kepercayaan</del> 77 diperbaiki nilai</li> <li>- 107 rumus (error)</li> <li>- kerangka konseptual</li> <li>- hipotesis</li> <li>- sampel</li> <li>- daftar pustaka</li> <li>- penentuan awal?</li> </ul>		
29/08 -2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem akuntansi pemerintah sebagai bab 1-3</li> <li>- kerangka konseptual</li> <li>- hipotesis</li> <li>- sampel</li> <li>- daftar pustaka</li> </ul>		

Are Seminar Proposal

25/08  
-2018

Medan, 30 Juli 2018  
 Diketahui/Disetujui oleh :  
 Dekan,



Dr. Surya Nita S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**  
 Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing I : Drs. Abdul Hasyim BB, Ak., M.M  
 Dosen Pembimbing II : Fitri Yoni Panggabean, SE, M.P.  
 Nama Mahasiswa : NURBAIDAH HANUM  
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100046  
 Jenjang Pendidikan : S1 (Strata Satu)  
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintahan (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Binjai)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
1/4 - 19	Revisi yg sudah benar Tada.	Ab	
8/4 - 19	Revisi.	An	
12/4 - 19	Revisi.	Apr	
15/4 - 19	Revisi.	Apr	

Medan, 06 April 2019  
 Diketahui/Disetujui oleh :  
 Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Dosen Pembimbing I : Drs. Abdul Hasjan BB, Ak., M.M  
Dosen Pembimbing II : Fitri Yuni Panggabean, SE., M.Si  
Nama Mahasiswa : NURBAIDAH HANUM  
Jurusan/Program Studi : Akuntansi  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100046  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu  
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pemowisan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bangau)

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pemowisan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bangau)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
20/4-2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki cover kata skripsi diberikan spasi disetiap huruf</li> <li>- Persetujuan lain, Untuk anggota II dan III jangan diberi nama</li> <li>- Surat pernyataan, kata suratnya dihilangkan</li> <li>- dibawah kata abstrak dan ab stract diberikan garis bawah tebal dan kata kunci tidak di bold, paragraf pertama dirata kanan dengan isi jangan di tab.</li> <li>- Moto dan persembahan diganti menjadi halaman persembahan</li> <li>- kata pengantar dikalimat judul jangan di bold dan letakkan titik dibelakang tanda kutip, penulisan gelar, penjabaran pembimbing ? tidak perlu ditulis dalam kurung capi.</li> <li>- Daftar isi jangan di bold, diberikan spasi, BAB tidak diberikan titik, BAB V kesimpulan dan saran diubah menjadi simpulan dan saran.</li> </ul>		

Medan, 06 April 2019  
Diketahui/Disetujui oleh :



Dekan  
Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing I : Drs. Abdul Hasyim SP, AK., M.M  
 Dosen Pembimbing II : Fitri Yani Penggabean, SE., M.Si  
 Nama Mahasiswa : NURBAIDAH HANUM  
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100046  
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu  
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pangai)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
20/4-2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Daftar tabel dibentkan spasi</li> <li>-Daftar gambar juga beritikan spasi</li> <li>-BAB I kutipan ditulis nama belakangnya saja, kalimat dinotikan dijadikan satu paragraf,</li> <li>-Identifikasi masalah jelaskan adanya penurunan apa misalkan kinerja</li> <li>-BAB II poin a), b) c) beritikan (, di belakang kalimat</li> <li>-Penelitian terdahulu kata adalah sebagai bentuk diganti, tabel gurakan margin, variabel hilangkan kata independen dan dependen, Font 10, time newsroman</li> <li>-Kerangka konseptual <math>X_1, X_2</math> buat beritikan</li> <li>-Ganti hipotesis, tidak ada menggunakan kata diduga.</li> <li>-Tabel skedul penelitian, populasi dan sampel operasional variabel deskripsi beritikan sumber.</li> <li>-Teknik pengumpulan data</li> <li>-Uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas uji multikolinieritas, analisis regresi berganda, uji parsial</li> <li>-Daftar pustaka, biodata.</li> </ul>		

Medan, 06 April 2019

Diketahui/Disetujui oleh:  
 Dekan



Dr. Surya Nata, S.H., M.Hum.



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing I : Drs. Abdul Hasjim BB, Ak., M.M  
 Dosen Pembimbing II : Fitri Yuni Panggabean, SE., M.Si  
 Nama Mahasiswa : NURBAIDAH HANUM  
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100046  
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu  
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kepatuhan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Binjai)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
4/05-2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abstrak</li> <li>- Halaman persebaran</li> <li>- Daftar isi</li> <li>- Retriki Penelitian terdahulu (Pembahasan)</li> <li>- Tabel dan</li> <li>- latar belakang Masalah</li> </ul>		
	<p>Acc Sicilang Skripsi   13/05-2019                      DP II</p>		

Medan, 06 April 2019  
 Diketahui/Ditetujui oleh :  
 Dekan



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



# Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

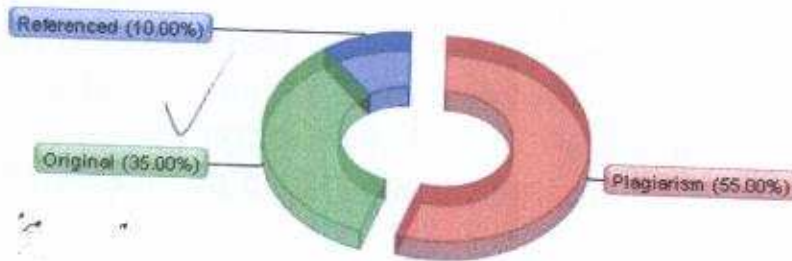
Analyzed document: 23/05/2019 09:53:23

## "NURBAIDAH HANUM\_1415100046\_AKUNTANSI.docx"

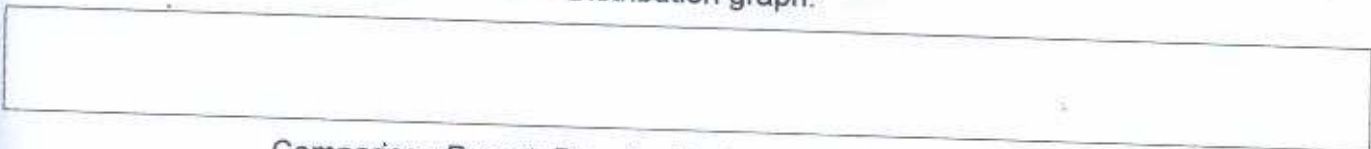
Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi\_License4



Relation chart:



Distribution graph:



Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

### Top sources of plagiarism:

- % 98 wrds: 8663 <http://digilib.unila.ac.id/22224/3/TESES%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>
- % 90 wrds: 8223 <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/301/1/Ranny%20Hanafi.pdf>
- % 80 wrds: 7230 <http://jurnal.stle-mandala.ac.id/index.php/relasi/article/download/263/247>

[Show other Sources:]

### Processed resources details:

315 - Ok / 64 - Failed

[Show other Sources:]

### Important notes:

- Wikipedia:
- Google Books:
- Ghostwriting services:
- Anti-cheating:

## ABSTRAK

---

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah (studi empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Binjai). Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Binjai dan teknik pengambilan yang digunakan adalah *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan metode asosiatif. Data yang digunakan adalah data primer yaitu kuesioner dan hasil wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah, pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Artinya, jika sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah semakin baik maka nilai informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik juga.

Kata kunci : Nilai Informasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pengawasan Keuangan Daerah

## **ABSTRACT**

---

*The research was conducted aimed at knowing the effect of the government internal control system and regional financial supervision on the value of government financial report information (empirical studies on Regional Work Units in the City of Binjai). The population and sample in this study are all Regional Work Units in Binjai City and the sampling technique used was purposive sampling. This study used associative method. The data used are primary data that is questionnaire and interview results. Based on the results of research conducted, it can be concluded that the effect of government internal control systems and regional financial supervision simultaneously have a significant positive effect on the value of government financial statement information, the influence of government internal control systems and regional financial supervision partially has a significant positive effect on the value of government financial statement information . That is, if the system of government internal control and regional financial supervision is getting better, the value of information from financial reports produced by the government will be better too.*

*Keywords: Information value, the system of intern control, the control of regional finance*

# DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	5
C. Perumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian .....	7

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan teori .....	10
1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah .....	10
a. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern .....	11
b. Tujuan Pengendalian Intern Pemerintah .....	13
c. Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Pengendalian Internal .....	14
2. Pengawasan Keuangan Daerah .....	15
a. Pengertian Pengawasan .....	15
b. Pengertian Keuangan Daerah .....	17
c. Pengertian Pegawai Keuangan Daeah .....	18
3. Nilai Informasi Laporan Keuangan .....	20
a. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	20
b. Tujuan Pelaporan Keuangan .....	20
c. Nilai Informasi Laporan Keuangan .....	21
B. PenelitianTerdahulu .....	22
C. Kerangka Konseptual .....	24
D. Hipotesis .....	27

## BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian .....	28
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	28
1. Tempat Penelitian .....	28

2. Waktu Penelitian .....	28
C. Populasi dan Sampel .....	29
1. Populasi .....	29
2. Sampel .....	29
D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	30
1. Variabel Penelitian .....	30
2. Definisi Operasional .....	31
E. Teknik Pengumpulan Data .....	32
1. Dokumentasi .....	32
2. Penelitian Kepustakaan .....	32
3. Observasi .....	32
F. Teknik Analisis Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	39
1. Sejarah Singkat Pemerintah Kota Binjai .....	39
2. Visi dan Misi .....	44
a. Visi .....	44
b. Misi .....	44
3. Deskripsi Karakteristik Responden .....	44
a. Berdasarkan Jenis Kelamin .....	45
b. Berdasarkan Umur .....	46
c. Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	46
d. Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan .....	47
e. Berdasarkan Lama Bekerja .....	47
4. Deskripsi Variabel Penelitian .....	48
5. Deskripsi Analisis Data .....	48
a. Pengujian Kualitas Data .....	48
1) Uji Validitas .....	48
2) Uji Reliabilitas .....	50
b. Pengujian Asumsi Klasik .....	50
1) Uji Normalitas .....	51
2) Uji Heteroskedastisitas .....	52
3) Uji Multikolonieritas .....	53
c. Pengujian Analisis Regresi Linier Berganda .....	54
d. Pengujian Hipotesis .....	55
1) Uji F .....	55
2) Uji t .....	56
3) Koefisien Determinasi .....	58
B. Pembahasan .....	58
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Simpulan .....	63
B. Saran .....	63

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN  
BIODATA

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Hasil Penelitian Terdahulu .....22
Tabel 3.1	Skedul Proses Penelitian .....29
Tabel 3.2	Operasional Variabel .....31
Tabel 4.1	Populasi Yang Menjadi Sampel .....42
Tabel 4.2	Daftar Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Binjai .....43
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....45
Tabel 4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Umur .....46
Tabel 4.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir ....46
Tabel 4.6	Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan .....47
Tabel 4.7	Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja .....47
Tabel 4.8	Hasil Uji Validitas .....49
Tabel 4.9	Uji Reliabilitas .....50
Tabel 4.10	Hasil Uji Normalitas Data .....51
Tabel 4.11	Hasil Uji Multikolonieritas .....54
Tabel 4.12	Hasil Uji Regresi Linier Berganda .....54
Tabel 4.13	Hasil Uji Simultan (Uji F) .....56
Tabel 4.14	Hasil Uji Parsial (Uji t) .....57
Tabel 4.15	Hasil Koefisien Determinasi .....58

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	26
Gambar 4.1 PP Plot Uji Normalitas .....	52
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	53



## HALAMAN PERSEMBAHAN

### **Motto :**

- Semua hal akan terasa sulit dan mustahil dilakukan sampai akhirnya tercapai. Seorang pemenang adalah seorang pemimpi yang tidak pernah menyerah dan putus asa. (Nelson Mandela)
- Hidup tidak memberimu apa yang kamu inginkan, tetapi memberimu sesuai dengan apa yang kamu kerjakan dan usahakan. (Agnes Mo)
- Tidak peduli betapa lambat maupun pelannya kamu berjalan. Yang terpenting adalah kamu selalu berjalan kedepan dan tidak pernah menyerah.
- Jangan pernah kamu merasa tidak pantas, hanya karena orang bilang kamu tidak berkualitas. Jangan pernah hilang harapan hanya karena kamu pernah mengalami kegagalan. (Merry Riana)

### **Kupersembahkan kepada:**

- Allah SWT pemberi rahmat, kesabaran dan kerendahan hati.
- Alm. Bapak dan Mamak yang penulis sayangi, yang selalu memberi dukungan dan doa kepada anak-anaknya.
- Kakak dan adikku tersayang yang selalu mendukung dalam hal apapun.
- Teman-teman seangkatan 2014.
- Almamater.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa penulis ucapkan karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Adapun judul skripsi penulis yaitu : “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah. (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Binjai)”.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Drs. Abdul Hasyim BB, AK., M.M selaku dosen pembimbing I yang sudah memberikan kritik, saran serta masukan terhadap perbaikan skripsi saya.
5. Ibu Fitri Yani Panggabean SE., M.Si selaku dosen pembimbing II yang juga banyak membantu memberikan masukan dalam perbaikan skripsi saya.
6. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah memberikan ilmunya kepada

penulis selama masih dalam proses perkuliahan sebagai bekal dalam proses penyusunan skripsi ini.

7. Kedua orang tua penulis yang tercinta, bapak Alm. Sadiman Saka dan mamakku Budiati serta kakak dan adik penulis (Dwi Nur Mustika Dewi, SE dan Melani Tria Ningrum) yang penulis sayangi yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu *Manager*/Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Binjai telah banyak membantu dan memberikan kemudahan bagi saya.
9. Sahabat dekat penulis yang tersayang Friska Marpaung, Syahna Zatira, Fitri Rahmadani, Anisa Apriani, Andriani Safitri, Meilisa Karniaty, SH, Dupuja Darshini, S.Ak, Dusenthy Maler, S.Ak, dan Happy Sembiring, SE yang senantiasa membantu penulis dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan skripsi ini.

Medan, Mei 2019

Penulis,

NURBAIDAH HANUM

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Saat ini telah kita tahu bahwa meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good government governance*), yang telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Menurut Kusumastuti, (2014:2) “Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya”.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yaitu berupa laporan keuangan.

Salah satu cara bagaimana melihat apakah laporan keuangan yang telah disusun sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan telah menghasilkan nilai informasi yang diharapkan, dapat dilihat dari opini auditor. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahun 2014 opini audit LKPD kota Binjai mendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP), sedangkan pada tahun 2015

opini audit LKPD Kota Binjai mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sehingga terlihat adanya penurunan kinerja. Pemberian opini tersebut tidak terlepas dari beberapa hal yang mempengaruhinya antara lain masih berkuat pada permasalahan aset yang tidak kunjung tuntas, terdapat beberapa kekurangan kelengkapan, seperti belum lengkapnya laporan dalam penyusunan aset dan keterlambatan penyampaian laporan keuangan (Berdasarkan informasi dari harian antara sumut tahun 2016 berjudul BPK : Pemkot Binjai Raih WDP LKPD 2015 yang diakses tanggal 25 Mei 2016).

Menurut Priyanto, (2013:1) “Nilai informasi bisa diartikan sebagai data dengan arti atau makna atau informasi yang memiliki arti penting dan manfaat yang relatif untuk membuat suatu keputusan untuk melakukan tindakan selanjutnya”. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut nantinya dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang diisyaratkan.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan) antara lain: (1) relevan, (2) andal, (3)

dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami. Untuk itu, diperlukan adanya Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, yang mana nantinya akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern menyatakan bahwa pengendalian intern meliputi berbagai kebijakan yaitu, (1) terkait dengan catatan keuangan, (2) memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang memadai, (3) memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan pemerintah. Jika penerapan SPI berjalan dengan baik maka laporan keuangan yang dihasilkan akan mempunyai nilai informasi yang baik, begitu juga sebaliknya jika penerapan SPI tidak berjalan dengan baik maka akan memungkinkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak mempunyai nilai informasi yang baik.

Pengawasan pengelolaan keuangan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi.

Pengawasan keuangan daerah terkait dengan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pada semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah di Kota Binjai.

Komponen pengendalian internal merupakan proses untuk menghasilkan pengendalian yang memadai. Dalam komponen pengendalian internal yang lain, aktivitas pengendalian, terdapat bentuk aktivitas pengendalian yaitu pemisahan tugas yang berguna untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan usaha untuk menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan tugas oleh orang-orang terkait yang akan mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan yang dihasilkan.

Pengawasan dalam sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan integritasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pembinaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah harus dilakukan secara terus-menerus. Kemudian, diperlukan perubahan pola pikir Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagai pemberi peringatan dini terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi nepotisme, kolusi dan korupsi.

Dari pernyataan di atas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Binjai)”.

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis membuat identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahun 2014 opini audit LKPD kota Binjai mendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP), sedangkan pada tahun 2015 opini audit LKPD Kota Binjai mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sehingga terlihat adanya penurunan kinerja.
- b. Hal yang mempengaruhi opini audit masih berfokus pada permasalahan aset yang tidak kunjung tuntas, terdapat beberapa kekurangan kelengkapan, seperti belum lengkapnya laporan dalam penyusunan aset dan keterlambatan penyampaian laporan keuangan (dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan oleh BPK RI Provinsi Sumatera Utara).

### **2. Batasan Masalah**

Dalam membatasi permasalahan dalam penelitian ini dan untuk menghindari pembahasan yang tidak terarah, maka batasan masalah dalam



penelitian ini adalah Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Binjai).

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis membuat perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah ?
2. Apakah Pengawasan Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah ?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara simultan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah secara parsial terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah.

## **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi peneliti, meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam bidang Akuntansi Sektor Publik dan mewujudkan dalam bidang skripsi. Serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai pengelolaan keuangan daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Binjai dalam memahami perbandingan antara konsep yang diberikan pada masa perkuliahan dengan penerapannya langsung di instansi pemerintahan.
- b. Bagi Pemerintah Daerah Kota Binjai, penulis harapan dapat memberi masukan mengenai pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah serta dapat menjadi perbaikan untuk kedepannya.
- c. Bagi pihak lain, penulis harapan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah Kota Binjai, serta dapat memberikan masukan, dapat menjadi acuan dan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Gerry Armando (2013), Universitas Negeri Padang dengan judul: “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di

Kota Bukittinggi)”. Sedangkan penelitian ini berjudul: “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Binjai)”. Perbedaan penelitian terletak pada:

1. Model Penelitian : Penelitian terdahulu menggunakan penelitian kausatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan asosiatif.
2. Waktu Penelitian : Penelitian terdahulu dilakukan tahun 2013 sedangkan penelitian sekarang dilakukan tahun 2018.
3. Lokasi Penelitian : Lokasi penelitian terdahulu pada SKPD di Kota Bukittinggi. Sedangkan lokasi penelitian sekarang pada SKPD di Kota Binjai.
4. Populasi dan Sampel : Penelitian terdahulu populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Bukittinggi berjumlah 29 SKPD dan teknik pengambilan menggunakan *total sampling*. Sedangkan penelitian sekarang populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Binjai berjumlah 21 SKPD dan teknik pengambilan yang digunakan adalah *purposive sampling*.
5. Variabel Penelitian : Penelitian terdahulu variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas variabel endogen nilai informasi laporan keuangan (Y), variabel eksogen pengendalian intern pemerintah ( $X_1$ ) dan variabel intervening pengawasan keuangan daerah ( $X_2$ ). Sedangkan penelitian sekarang variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel bebas pertama sistem pengendalian intern pemerintah ( $X_1$ ),

variabel bebas kedua pengawasan keuangan daerah ( $X_2$ ) serta variabel terikat nilai informasi laporan keuangan ( $Y$ ).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. LANDASAN TEORI**

##### **1. Pengertian Sistem Pengendalian**

Pengendalian internal merupakan salah satu fungsi manajemen. Penerapan sistem pengendalian intern harus dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan, dengan demikian melalui penerapan sistem pengendalian internal dapat diperoleh informasi kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Informasi tersebut dapat digunakan untuk penyempurnaan kegiatan dan pengambilan keputusan oleh pimpinan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada pasal 1 menyatakan : "Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, yang kemudian disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah."

Lebih lanjut dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa : "Untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan".

### **a. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern**

Penjelasan Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 terdiri dari :

- 1) Lingkungan Pengendalian,
- 2) Penilaian Risiko,
- 3) Kegiatan Pengendalian,
- 4) Informasi dan Komunikasi,
- 5) Pemantauan Pengendalian Internal.

Unsur-unsur Sistem Pengendalian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1) Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam lingkungan kerjanya.

Lingkungan pengendalian terdiri dari :

- a) Penegakan integritas dan nilai etika,
- b) Komitmen terhadap kompetensi,
- c) Kepemimpinan yang kondusif,
- d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan,
- e) Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat,
- f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia,
- g) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif,
- h) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

## 2) Penilaian Resiko

Dalam rangka penilaian resiko, pimpinan Instansi Pemerintah dapat menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penilaian risiko terdiri dari :

- a) Penetapan tujuan instansi secara keseluruhan,
- b) Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan,
- c) Identifikasi risiko,
- d) Analisis risiko,
- e) Mengelola risiko selama perubahan.

## 3) Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dari sifat dan tugas dan fungsi yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian terdiri dari :

- a) *Review* atas Kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan,
- b) Pembinaan sumber daya manusia,
- c) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi,
- d) Pengendalian fisik atas aset,
- e) Penetapan dan *review* atas indikator dan ukuran kinerja,
- f) Pemisahan fungsi,
- g) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting,
- h) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian,
- i) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya,

- j) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, dan
  - k) Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dalam kejadian penting.
- 4) Informasi dan Komunikasi
- Pimpinan instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif.
- a) Informasi,
  - b) Komunikasi,
  - c) Bentuk dan sarana komunikasi.
- 5) Pemantauan
- Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Internal melalui :
- a) Pemantauan berkelanjutan,
  - b) Evaluasi terpisah,
  - c) Penyelesaian audit.

#### **b. Tujuan Pengendalian Internal**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 2 ayat (3) tujuan Sistem Pengendalian Internal, yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai atas bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.



Menurut Mulyadi (2013:163) “Tujuan Sistem Pengendalian Intern adalah menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, serta mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”.

### **c. Pihak Yang Bertanggungjawab Atas Pengendalian Internal**

Terdapat pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pengendalian internal organisasi, diantaranya adalah:

#### 1) Manajemen

Manajemen bertanggungjawab untuk mengembangkan dan menyelenggarakan secara efektif pengendalian intern organisasinya. Direktur utama perusahaan bertanggungjawab untuk menciptakan atmosfer pengendalian di tingkat puncak, agar kesadaran terhadap pentingnya pengendalian menjadi tumbuh di seluruh organisasi.

#### 2) Dewan Komisaris dan Komite Audit

Dewan komisaris bertanggungjawab untuk menentukan apakah manajemen bertanggungjawab dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern.

#### 3) Auditor Intern

Auditor intern bertanggungjawab untuk memeriksa dan mengevaluasi memadai atau tidaknya pengendalian inter entitas dan membuat rekomendasi peningkatannya.

#### 4) Personel Lain Entitas

Peran dan tanggung jawab semua personel lain yang menyediakan informasi atau yang menggunakan informasi yang dihasilkan oleh

pengendalian intern harus menggunakan informasi yang dihasilkan oleh pengendalian intern harus ditetapkan dan dikomunikasikan dengan baik.

#### 5) Auditor Independen

Sebagai bagian dari prosedur auditnya terhadap laporan keuangan, auditor dapat menemukan kelemahan pengendalian intern kliennya, sehingga ia dapat mengkomunikasikan temuan auditnya tersebut kepada manajemen, komite audit, atau dewan komisaris. Berdasarkan temuan auditor tersebut, manajemen dapat melakukan peningkatan pengendalian intern entitas.

## **2. Pengawasan Keuangan Daerah**

### **a. Pengertian Pengawasan**

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Fungsi-fungsi yang ada didalam manajemen adalah fungsi perencanaan (*Planning*), fungsi pengorganisasian (*Organizing*), fungsi pelaksanaan (*Actuating*) dan fungsi pengawasan (*Controlling*)". Keempat fungsi manajemen tersebut harus dilaksanakan oleh seorang manajer secara berkesinambungan, sehingga dapat merealisasikan tujuan organisasi. Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Menurut Ulum (2009) mendefinisikan "Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi".

Sedangkan menurut Sumarsono (2010) menyatakan bahwa “Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah di gariskan.”

Suatu pengawasan dapat dinilai efektif, apabila mempunyai karakteristik seperti akurat, tepat waktu, obyektif dan menyeluruh, terpusat pada titik-titik pengawasan strategik, realistik secara ekonomis, realistik secara organisasional, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, fleksibel, bersifat sebagai petunjuk dan operasional, serta diterima para anggota organisasi. Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan untuk mencapai tujuan dari yang telah direncanakan. Maka perlu ada pengawasan, karena dengan pengawasan tersebut tujuan yang akan dicapai yang dapat dilihat dengan berpedoman pada rencana (*planning*) yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Ketiga hal tersebut pada dasarnya berbeda baik konsepsi maupun aplikasinya. Pengawasan oleh DPRD dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan, penyelewengan yang disebabkan oleh adanya penyalahgunaan wewenang oleh eksekutif, maka pemberian wewenang tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan dapat dioptimalkan peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbangan (*balance of power*) bagi eksekutif secara langsung maupun tidak langsung melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi sosial kemasyarakatan sebagai bentuk *social control*.

Dengan demikian dapat dilakukan bahwa pada prinsipnya pengawasan itu, sangat penting dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehingga pengawasan diadakan dengan maksud yakni:

- 1) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak lancar,
- 2) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru,
- 3) Mengetahui apakah penggunaan anggaran (*badget*) yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan,
- 4) Mengetahui rencana kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti telah ditentukan dalam *planning* atau tidak,
- 5) Mengetahui hasil pekerjaan dibanding dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*.

#### **b. Pengertian Keuangan Daerah**

Keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa:

“Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

### **c. Pengertian Pengawasan Keuangan Daerah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011, pengawasan Keuangan Daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-perundangan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Pengawasan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa: “Pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD pada kesempatan ini meliputi: pengawasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, pengawasan berupa Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD); Persetujuan DPRD Atas Rencana Kerjasama Daerah, Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, dan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Pelaksanaan Kunjungan Kerja dan Studi Komperasi; Pelaksanaan Konsultasi; Pelaksanaan Reses; Pengelolaan Aspirasi; Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP); dan Pelaksanaan Rapat Kerja. Menurut Pedansa,

Raru dan Suerani (2013) dalam Silfiana “Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan, penyelewengan yang disebabkan oleh adanya penyalahgunaan wewenang oleh eksekutif, pemberian wewenang tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat, sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan menjadi relevan”.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. Selain kewenangan pengawasan seperti diatas, DPRD juga melaksanakan tugas dan wewenang lain dalam kerangka fungsi pengawasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain melakukan pembahasan atau menindaklanjuti beberapa hal terkait kinerja pemerintah daerah antara lain laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan, menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap eksekutif dimaksudkan agar dapat jaminan terciptanya pada pengelolaan anggaran daerah yang terhindar dari praktik-praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) baik mulai dari proses perencanaan, pengesahan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban. Disamping DPRD mengawasi secara langsung tentang mekanisme anggaran, DPRD juga menggunakan aparat pengawasan eksternal pemerintah, yang independen terhadap

lembaga eksekutif di daerah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap penyusunan dan pelaporan APBD. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang termasuk dalam ruang lingkup pengawasan pengelolaan keuangan daerah ialah:

- 1) Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah,
- 2) Pertanggungjawaban keuangan daerah,
- 3) Pendapatan dan belanja daerah.

### **3. Nilai Informasi Laporan Keuangan**

#### **a. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

#### **b. Tujuan Pelaporan Keuangan**

Menurut Mardiasmo (2009:161) dalam Armando secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan dan Pengelolaan (*Compliance and Stewardship*),
- 2) Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*Accountability and Retrospective Reporting*),

- 3) Perencanaan dan Informasi Otorisasi (*Planning and Authorization Information*),
- 4) Kelangsungan Organisasi (*Viability*),
- 5) Hubungan Masyarakat (*Public Relation*),
- 6) Sumber Fakta dan Gambaran (*Source of Fact and Figures*).

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait.

### **c. Nilai Informasi Laporan Keuangan**

Menurut Harifan (2009) dalam Armando “Dalam menghasilkan suatu informasi yang bernilai (dapat dipahami) disini menyangkut dua elemen pokok, yaitu informasi yang dihasilkan dan sumber daya yang menghasilkan.” Menyangkut informasi yang dihasilkan, maka informasi laporan keuangan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terlalu rumit bagi pemakai dan bernilai, dengan tidak menggunakan istilah-istilah yang kabur serta menggunakan klarifikasi peraturan yang lazim atau berlaku.

Kebermanfaatan ini merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pemakai, dan keyakinan pemakai terhadap informasi. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) antara lain :

- 1) Relevan,
- 2) Andal,



- 3) Dapat dibandingkan, dan
- 4) Dapat dipahami.

## B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang digunakan sebagai referensi pengembangan penelitian seperti dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1 Mapping Penelitian Sebelumnya

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Gerry Armando (2013) Universitas Negeri Padang	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah	X <sub>1</sub> : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, X <sub>2</sub> : Pengawasan Keuangan, Y : Nilai Informasi Laporan Keuangan.	1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pada pemerintah Kota Bukittinggi. Di mana semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka semakin baik pula nilai informasi laporan keuangan pemerintah kota Bukittinggi. 2. Penerapan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pada pemerintah Kota Bukittinggi. Di mana semakin baik penerapan pengawasan keuangan daerah maka semakin baik pula nilai informasi laporan keuangan pemerintah kota Bukittinggi. 3. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Pengawasan Keuangan Daerah. Di mana semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka akan semakin baik pula pengawasan keuangan daerah.
2	Silfiana (2015) Universitas Widyatama	Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah dan	X <sub>1</sub> : Pengawasan Keuangan Daerah,	1. Secara parsial variabel pengawasan keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan

		Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	X <sub>2</sub> : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  Y : Kualitas Laporan Keuangan Daerah	keuangan pemerintah daerah kota Bandung. Artinya Pemerintah Daerah Kota Bandung telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, pertanggungjawaban keuangan daerah serta pendapatan dan belanja daerah yang sudah dilaksanakan dengan baik. 2. Secara parsial variabel sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah kota Bandung. Artinya sistem pengendalian intern pada Pemerintah Daerah Kota Bandung telah dilaksanakan dengan baik yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan telah sesuai dengan petunjuk unsur-unsur pengendalian internal. Semakin baik pengendalian internal pemerintah maka laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan akan semakin berkualitas 3. secara simultan menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Bandung. Artinya semakin baik pengawasan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah akan meningkatkan kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kota Bandung.
3	Komang Sartika Dewi (2014) Universitas Pendidikan Ganesha	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi	X <sub>1</sub> : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,  X <sub>2</sub> : Pengawasan Keuangan	1. Sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah pada SKPD di Kabupaten Buleleng. 2. sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh

		Laporan Keuangan Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Y : Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	positif dan signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pada SKPD di Kabupaten Buleleng. 3. Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pada pemerintah pada SKPD di Kabupaten Buleleng. 4. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.
--	--	---	---	--

### C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah dikemukakan di atas dapat dijelaskan bahwa untuk meningkatkan nilai informasi laporan keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah harus memadai dan pengawasan keuangan daerah yang layak di pemerintahan Kota Binjai.

Informasi keuangan yang mempunyai nilai adalah informasi yang dapat dimengerti dan dimanfaatkan bagi pemakainya dalam pengambilan keputusan. Hasil evaluasi pemeriksaan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menunjukkan bahwa masih terdapat LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian dan memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan suatu proses yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku, dan

keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah yang terlihat dari nilai informasi laporan keuangan.

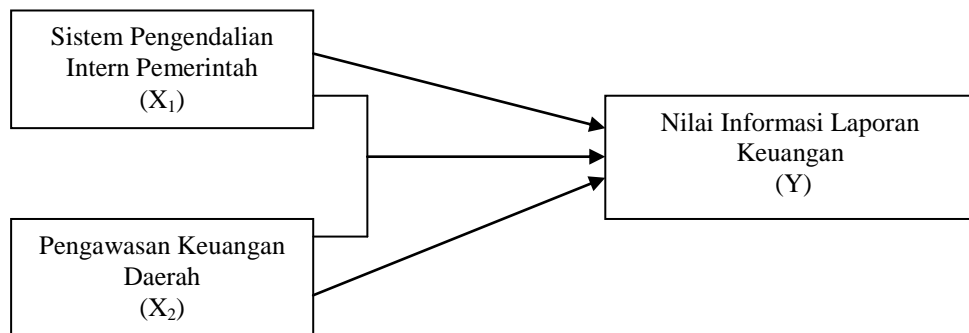
Sistem pengendalian intern juga menentukan nilai informasi laporan keuangan yang baik. Sistem pengendalian intern terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan. Menurut Armando (2013) “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan, dimana semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka semakin baik pula nilai informasi laporan keuangan pemerintah”.

Pengawasan keuangan daerah pemerintah adalah pengawasan keuangan daerah yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengawasan keuangan daerah pemerintah juga menentukan nilai informasi laporan keuangan yang baik. Pengawasan keuangan daerah pemerintah terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan.

Pengawasan merupakan upaya untuk mengenali penyimpangan atau hambatan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, diharapkan akan dapat segera dideteksi atau diambil tindakan koreksi, sehingga informasi keuangan dapat segera digunakan oleh pemakai, dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat berjalan secara maksimal. Menurut Fajrin (2014) “Pengawasan keuangan daerah yang baik yang dilakukan oleh aparat inspektorat

sebagai pengawas internal pemerintah, maka akan terwujud nilai informasi laporan keuangan yang baik pula”.

Salah satu komponen pengendalian intern yaitu aktivitas pengawasan yang berhadapan dengan penilaian berkelanjutan dari mutu penampilan atau prestasi pengendalian intern. Pengawasan dalam sistem pengendalian intern diarahkan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Armando (2013) “Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah melalui pengawasan keuangan daerah, dimana semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka akan semakin baik pula pengawasan keuangan daerah”. Adapun kerangka konseptual tersebut digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

#### **D. Hipotesis**

Menurut Rusiadi, dalam Elfridaini (2013:79), “Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya”.

Adapun hipotesis yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H<sub>1</sub> : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah studi empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Binjai.
- H<sub>2</sub> : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah studi empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Binjai.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian asosiatif/kuantitatif. Menurut Rusiadi (2013:14) dalam Elfridaini “Penelitian asosiatif/kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui derajat hubungan dan pola/bentuk pengaruh antar dua variabel atau lebih, dimana dengan penelitian ini maka akan dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala”. Penelitian ini membahas dua variabel yaitu sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara.

##### **2. Waktu Penelitian**

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini dimulai dari bulan Januari Tahun 2018 sampai dengan selesai. Seperti dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian

No	Kegiatan	2018							2019		
		Jan	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Apr	Mei	Jul
1	Pengajuan Proposal	■									
2	Penulisan Proposal		■	■	■	■					
3	Bimbingan Proposal					■					
4	Seminar Proposal						■				
5	Pengolahan Data							■			
6	Analisis dan Evaluasi Data							■			
7	Penulisan Skripsi							■			
8	Bimbingan Skripsi								■	■	
9	Sidang Meja Hijau										■

Sumber: Penulis, 2018

## C. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Menurut Sujarweni (2014:65) “Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Binjai berjumlah 21 SKPD.

### 2. Sampel

Menurut Sujarweni (2015:81) “Sampel adalah bagian dari sejumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian”. Menurut Sugiyono (2015:116) “Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin



mempelajari semua yang ada pada populasi, karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi”.

Teknik pengambilan yang digunakan adalah *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2012:96) “*purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penentuan karakteristik populasinya dilakukan dengan cermat didalam studi pendahuluan, pengambilan sampelnya harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri populasi”. Sampel yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah :

- a. kepala bagian dan pegawai yang bertanggungjawab dalam pembuatan laporan keuangan pada masing-masing SKPD, juga setiap bagian tersebut merupakan elemen penting dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah serta memahami kegiatan tersebut,
- b. Telah berkerja selama dua tahun atau lebih di Kota Binjai tersebut,
- c. Sudah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di SKPD tersebut.

#### **D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

##### **1. Variabel Penelitian**

Variabel penelitian mencakup variabel apa yang akan diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel bebas yaitu: variabel bebas pertama Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( $X_1$ ) dan variabel bebas kedua

Pengawasan Keuangan Daerah ( $X_2$ ) serta variabel terikat Nilai Informasi Laporan Keuangan ( $Y$ ).

## 2. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana mengukur variabel. Definisi operasional dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis, instrumen, serta sumber pengukuran berasal darimana.

Tabel 3.2 Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Deskripsi	Skala
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( $X_1$ )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lingkungan Pengendalian</li> <li>2. Penilaian Resiko</li> <li>3. Kegiatan Pengendalian</li> <li>4. Informasi dan Komunikasi</li> <li>5. Pemantauan</li> </ol> <p>Sumber : Soimah (2014)</p>	<p>Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (<i>fraud</i>).</p> <p>Sumber : Armando (2008)</p>	Likert
Pengawasan Keuangan Daerah ( $X_2$ )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan Pengawasan</li> <li>2. Pelaksanaan Pengawasan</li> <li>3. Penyusunan Laporan</li> <li>4. Penunjang Proses Pengawasan</li> </ol> <p>Sumber : Lillati (2011)</p>	<p>Pengawasan Keuangan Daerah merupakan proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peratran perundang-undangan.</p> <p>Sumber : Armando (2008)</p>	Likert
Nilai Informasi Laporan Keuangan ( $Y$ )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Relevan</li> <li>2. Andal</li> <li>3. Dapat dibandingkan</li> <li>4. Dapat dipahami</li> </ol> <p>Sumber : Soimah (2014)</p>	<p>Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah adalah laporan keuangan yang memiliki informasi yang bermanfaat bagi pemakai untuk pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.</p> <p>Sumber : Armando (2008)</p>	Likert

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Dokumentasi

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari hal yang bersumber dari tulisan ilmiah, buku-buku, internet, atau yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yang terpilih di lokasi penelitian. Data primer penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan kuesioner pada kepala bagian dan staf akuntansi pada SKPD di Kota Binjai.

### 2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai literatur-literatur, membaca buku-buku, atau bahan yang tersedia di perpustakaan dan media pendukung lainnya, yang ada hubungannya dengan penulisan penelitian ini. Data dan keterangan yang diperoleh akan digunakan untuk pembahasan yang bersifat lebih teoritis, guna menuntun arah penelitian karena disertai rujukan-rujukan yang sifatnya lebih teoritis dari sumber yang jelas.

### 3. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran nyata suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melaksanakan pengukuran terhadap aspek

tertentu. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, atau kondisi tertentu yang berhubungan dengan Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah pada SKPD di Kota Binjai.

#### 4. Wawancara

Wawancara diperlukan untuk melengkapi data, biasanya diberikan kepada salah satu yang mewakili SKPD di Kota Binjai.

### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya, sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, penelitian ini menggunakan data kualitatif.

#### **1. Uji Kualitas Data**

Dalam melakukan pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner membutuhkan kesungguhan responden dalam menjawab pernyataan-pernyataan dan faktor situasional merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kualitas kuesioner yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

##### **a. Uji Validitas**

Uji validitas adalah untuk mengukur apakah data yang telah didapat setelah penelitian merupakan data yang valid dari alat ukur yang digunakan (kuesioner). Menurut Ghazali (2011) dalam Marpaung “Suatu kuesioner dikatakan valid jika suatu pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut”.

Pengukuran validitas instrument penelitian dilakukan dengan item, dimana setiap nilai yang ada pada setiap butir pertanyaan dikorelasikan dengan seluruh nilai total butir pertanyaan untuk suatu variabel dengan menggunakan rumus *product moment* dan bila korelasi antara butir-butir dengan skor total kurang dari 0,30 maka butir instrument tersebut dinyatakan tidak valid.

Perhitungan yang akan dilakukan dengan cara menggunakan program SPSS (*Statistical Package for Social Science*). Dimana validitas data diukur dengan membandingkan  $r_{hitung}$  dan  $r_{tabel}$ , jika:

- 1) Apabila  $r_{hitung} > r_{tabel}$  (pada taraf signifikan 5%), maka dapat dinyatakan valid
- 2) Apabila  $r_{hitung} < r_{tabel}$  (pada taraf signifikan 5%), maka dapat dinyatakan tidak valid.

#### **b. Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas menurut Amri, (2009:35) dalam Marpaung “Dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap apabila dilakukan dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama”. Butir kuesioner dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap kuesioner adalah konsisten. Dalam penelitian ini untuk menentukan kuesioner reliabel atau tidak dengan menggunakan *alpha cronbach*. Menurut Sunyoto (2013) dalam Marpaung “Kuesioner dikatakan reliabel jika *alpha cronbach*  $> 0,60$  dan tidak reliabel jika sama dengan atau dibawah 0,60”.

## **2. Uji Asumsi Klasik**

Untuk mengetahui kelayakan model regresi berganda, maka akan dilakukan uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar layak digunakan atau tidak.

### **a. Uji Normalitas**

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan *kolmogorov-smirnov*. Untuk mengetahui pedoman dalam pengambilan keputusan tentang data-data yang mendekati atau yang merupakan distribusi normal dapat dilihat dari nilai signifikan atau probabilitas  $< 0,05$  maka distribusi data tidak normal dan sebaliknya apabila nilai signifikan  $> 0,05$  maka distribusi data adalah normal.

### **b. Uji Heteroskedastisitas**

Adanya varians variabel independen adalah konstan untuk setiap nilai tertentu variabel independen (homokedastisitas). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan uji Scatterplot dengan pengambilan keputusan jika di mana tidak terjadi heteroskedastisitas jika titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, dan tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y.

### **c. Uji Multikolinieritas**

Menurut Ghozali, (2011) dalam Marpaung “Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas”. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel

bebas. Apabila variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas bernilai nol (0).

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas didalam model regresi adalah nilai  $R^2$  yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individu variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel independen.

Multikolinieritas dapat juga dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *Variance Inflation Factor (VIF)*. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen lainnya. Jadi *tolerance* yang rendah sama dengan VIF tinggi (karena  $VIF = 1 / tolerance$ ). Nilai *cut off* yang umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance*  $\leq 0,01$  atau sama dengan nilai  $VIF \geq 10$ .

### **3. Analisis Regresi Berganda**

Metode pengujian menggunakan metode analisis regresi berganda, hal ini akan menunjukkan hubungan (korelasi) antara kejadian satu dengan kejadian yang lain karena terdapat lebih dari dua variabel, maka hubungan linier dapat dinyatakan dalam persamaan regresi linier berganda. Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah) terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah, dengan persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Nilai Informasi aporan Keuangan Pemerintah

a = Konstanta

$b_1; b_2$  = Koefisien regresi berganda

$X_1$  = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

$X_2$  = Pengawasan Keuangan Daerah

e = Error.

#### 4. Uji Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah keadaan pernyataan yang akan diuji kebenarannya menggunakan data/informasi yang dikumpulkan melalui sampel. Untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh secara parsial dan simultan menggunakan uji t dan uji F. Dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 0,05 (5%) atau keyakinan 95% untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau ditolak. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model regresi linier berganda yang memiliki tujuan untuk memprediksi berapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Adapun uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

##### a. Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji t (uji parsial) digunakan untuk variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Adapun kriteria pengujian hipotesis yaitu:

Jika nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ ,  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini berarti bahwa terdapat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.



Jika nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$ ,  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

#### **b. Uji Simultan (Uji Statistik F)**

Uji F (uji simultan) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Menurut Ghozali, (2011:98) dalam Marpaung “Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel independen, namun jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen”.

#### **5. Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)**

Penelitian ini menggunakan koefisien determinasi *adjusted R<sup>2</sup>*, karena penggunaan koefisien *adjusted (R<sup>2</sup>)* mempunyai kelemahan yaitu bisa terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Menurut Ghozali (2009:97) dalam Marpaung “Setiap tambahan satu variabel independen, maka nilai  $R^2$  pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen”. Koefisien determinasi digunakan untuk menguji *goodness-fit* dari model regresi. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Menurut Ghozali (2013:177) dalam Marpaung “Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen”.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Pemerintah Kota Binjai**

Menurut penuturan para orang tua yang di anggap mengetahui asal mula timbulnya Binjai, yang saat ini menjadi kota binjai, dahulunya Kota Binjai adalah sebuah kampung kecil yang terletak di tepi sungai Bingai. Binjai sebenarnya nama suatu pohon besar, rindang,tumbuh dengan kokoh di tepi sungai Bingai yang bermuara di Sungai Wampu. Pada tahun 1823 Gubernur Inggris yang berkedudukan di Pulau Penang telah mengutus John Anderson untuk pergi ke pesisir Sumatera Timur dan dari catatannya di sebutkan sebuah kampung yang bernama Ba Bingai (*menurut buku Mission to The Eastcoast of sumatera-Edinbung 1826*). Sebarnya sejak tahun 1822, Binjai telah di jadikan bandar/pelabuhan dimana hasil pertanian lada yang diekspor adalah berasal dari perkebunan lada di sekitar ketapangai (pungai) atau Kelurahan kebun Lada/Damai.

Perkembangan zaman terus berjalan, pada tahun 1864 daerah Deli telah dicoba ditanami tembakau oleh pioner Belanda bernama J.Nienkyis dan 1866 didirikan Deli Maatschappiy. Usaha untuk menguasai tanah Deli oleh orang Belanda tidak terkecuali dengan menggunakan politik pecah belah melalui pengangkatan datuk-datuk. Usaha ini diketahui oleh Datuk Kocik, Datuk Jalil dan Suling Barat yang tidak mau berkerja sama dengan Belanda bahkan melakukan perlawanan. Bersamaan dengan itu Datuk Sunggal tidak menyetujui pemberian

konsensi tanah kepada perusahaan Rotterdammy oleh Sultan Deli karena tanpa persetujuan. Di bawah kepemimpinan Datuk Sunggal bersama rakyatnya di Timbang Langkat (Binjai) dibuat Benteng pertahanan untuk menghadapi Belanda.

Dengan tindakan Datuk Sunggal ini Belanda merasa terhina dan memerintahkan kapten koops untuk menumpas para datuk yang menentang Belanda dan pada 17 Mei 1872 terjadilah pertempuran yang sengit antara Datuk/masyarakat dengan Belanda. Peristiwa perlawanan inilah yang menjadi tonggak sejarah dan di tetapkan sebagai hari kota binjai perjuangan para Datuk/rakyat terus berkobar dan pada akhirnya pada 24 Oktober 1872 Datuk Kocik, Datuk Jalil dan Suling Barat dapat ditangkap belanda dan kemudian pada tahun 1873 di buang ke Cilacap. Pada tahun 1917 oleh pemerintah Belanda di keluarkan *Instelling Ordonantie* Nomor 12 dimana Binjai di jadikan Gemente dengan luas 267 Ha.

Pada tahun 1942-1945 Binjai di bawah pemerintahan jepang dengan kepala pemerintahannya adalah Kagujawa dengan sebutan guserbu dan tahun 1944/1945 pemerintahan kota di pimpin oleh ketua Dewan Eksekutif J.Runnanbi dengan anggota Dr. RM Djulham, Natangsa Sembiring dan Tan Hong Poh. Pada tahun 1945 (saat revolusi) sebagai kepala pemerintahan binjai adalah RM. Ibnu dan pada 29 Oktober 1945 T. Amir Hamzah diangkat menjadi residen Langkat oleh komite nasional dan pada masa pendudukan belanda 1947 Binjai berada di bawah asisten residen J.Bunger dan RM. Ibnu sebagai wakil wali kota Binjai pada tahun 1948-1950 Pemerintahan Kota Binjai di pegang oleh ASC More. Tahun 1950-1956 Binjai menjadi Kota Administratif Kabupaten Langkat dan sebagai Wali Kota adalah OK Salamuddin kemudian T. Ubaidullah Tahun 1953-1956.

Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 Kota Binjai menjadi otonom dengan Wali Kota pertama SS. Parumuhan.

Dalam perkembangannya Kota Binjai merupakan Daerah Tingkat II di Provinsi Sumatera Utara telah membenahi dirinya dengan melakukan pemekaran wilayahnya. Semenjak ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 wilayah kota daerah Kota Binjai telah di perluas menjadi 90,23 KM dengan 5 wilayah kecamatan yang terdiri dari 11 desa dan 11 kelurahan. Setelah diadakan pemecahan desa dan kelurahan pada tahun 1993 maka jumlah desa menjadi 17 dan kelurahan 20. Perubahan ini berdasarkan keputusan Gubernur Sumatra Utara No.140-1395/SK/1993 tanggal 3 Juni 1993 tentang pembentukan 6 desa persiapan dan kelurahan persiapan di Kota Binjai. Berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara No.146-2624/SK/1996 tanggal 7 Agustus 1996, 17 desa menjadi kelurahan.

Kota Binjai sebagai salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara yang hanya berjarak  $\pm$  22 Km dari Kota Medan ( $\pm$  30 menit perjalanan), bahkan batas terluar Kota Binjai dengan batas terluar Kota Medan hanya berjarak  $\pm$  8 KM. Kota Binjai berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat, serta berada pada jalur transportasi utama yang menghubungkan Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Nangroe Aceh Darurralam (NAD) serta ke Objek Wisata Bukit Lawang Kabupaten Langkat. Secara geografis Kota Binjai terletak pada posisi  $3^{\circ} 31' 31''$  -  $3^{\circ} 40' 2''$  LU dan  $98^{\circ} 27' 3''$  -  $98^{\circ} 32' 32''$  BT dan terletak  $\pm$  28 M di atas permukaan laut. Kota Binjai yang memiliki luas 9.023,62 Ha ( $\pm$  90,23 Km<sup>2</sup>) terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 37 (tiga puluh tujuh) Kelurahan serta mempunyai penduduk sebanyak 252.652 jiwa yang terdiri dari berbagai Etnis antara lain Melayu, Batak Toba, Batak Mandailing, Batak Karo, Batal

Simalungun, Jawa, Banten, Minang, Aceh, China dan India dengan pemeluk agama mayoritas Islam dan yang mempunyai kesadaran politik dan keamanan yang cukup tinggi, sehingga mendukung kondisi keamanan yang sangat kondusif. Kota Binjai sebagai Kota jasa, perindustrian, perdagangan dan pemukiman telah berupaya memacu laju pertumbuhan pembangunan yang mendukung pertumbuhan pembangunan ekonomi Kota Binjai.

Tabel 4.1  
Populasi Yang Menjadi Sampel

No.	Nama SKPD	Karakteristik			Keterangan
		1	2	3	
1.	Dinas Pendidikan	✓	✓	✓	Sampel 1
2.	Dinas Kesehatan	✓	✓	✓	Sampel 2
3.	RSUD Dr.R.M.Djoelham	✓	✓	✓	Sampel 3
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	✓	✓	-	
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	✓	✓	-	
6.	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP)	✓	✓	✓	Sampel 4
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	✓	✓	-	
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	✓	✓	✓	Sampel 5
9.	Dinas Sosial	✓	✓	-	
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan	✓	✓	-	
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat	✓	✓	✓	Sampel 6
12.	Dinas Lingkungan Hidup	✓	✓	✓	Sampel 7
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	✓	✓	✓	Sampel 8
14.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	✓	✓	-	
15.	Dinas Perhubungan	✓	✓	-	
16.	Komunikasi dan Informatika	✓	✓	-	
17.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	✓	✓	-	
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	✓	✓	✓	Sampel 9
19.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	✓	✓	✓	Sampel 10
20.	Dinas Perpustakaan	✓	✓	-	
21.	Dinas Pariwisata	✓	✓	-	
22.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	✓	✓	✓	Sampel 11

23.	DPRD	✓	✓	-	
24.	Walikota dan Wakil Walikota	✓	✓	✓	Tidak diberi Izin
25.	Bagian Umum	✓	✓	✓	Sampel 12
26.	Bagian Administrasi Pemerintah dan Kerjasama	✓	✓	-	
27.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	✓	✓	✓	Sampel 13
28.	Bagian Perekonomian	✓	✓	-	
29.	Bagian Administrasi Pembangunan	✓	✓	✓	Sampel 14
30.	Bagian Hukum	✓	✓	✓	Sampel 15
31.	Bagian Organisasi	✓	✓	✓	Sampel 16
32.	Bagian Hubungan Masyarakat	✓	✓	✓	Sampel 17
33.	Sekretariat DPRD	✓	✓	-	
34.	Kecamatan Binjai Selatan	✓	✓	-	
35.	Kecamatan Binjai Timur	✓	✓	-	
36.	Kecamatan Binjai Barat	✓	✓	-	
37.	Kecamatan Binjai Kota	✓	✓	-	
38.	Kecamatan Binjai Utara	✓	✓	-	
39.	Inspektorat Daerah Kota	✓	✓	✓	Sampel 18
40.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	✓	✓	✓	Sampel 19
41.	BPKPAD Selaku SKPD	✓	✓	✓	Sampel 20
42.	Badan Kepegawaian Daerah	✓	✓	✓	Sampel 21

Sumber : BPKPAD dan Inspektorat Daerah Kota (2018)

Tabel 4.2  
Daftar Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Binjai

No.	Nama SKPD
1.	Badan Kepegawaian Daerah
2.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.	Bagian Administrasi Pembangunan
5.	Bagian Hubungan Masyarakat
6.	Bagian Hukum
7.	Bagian Kesejahteraan Rakyat
8.	Bagian Organisasi
9.	Bagian Umum
10.	BPKPAD Selaku SKPD
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

13.	Dinas Kesehatan
14.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
15.	Dinas Lingkungan Hidup
16.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat
17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
18.	Dinas Pendidikan
19.	Inspektorat Daerah Kota
20.	RSUD Dr. R. M. Djoelham
21.	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP)

Sumber : Penulis (2019)

## **2. Visi dan Misi**

### **a. Visi**

Menuju Kota Binjai idaman yang dinamis, berdaya saing dan nyaman dalam kebersamaan.

### **b. Misi**

- 1) Membangun Kota Binjai idaman yang dinamis dan berdaya saing
- 2) Membangun dan meningkatkan infrastruktur perekonomian
- 3) Membangun masyarakat sehat, cerdas dan berbudaya
- 4) Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas
- 5) Membangun dan membina kerukunan hidup beragama

## **3. Deskripsi Karakter Responden**

Deskripsi karakteristik responden adalah menguraikan atau memberikan gambaran mengenai identitas responden dalam penelitian ini, karena dengan menguraikan identitas responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini sehingga akan dapat diketahui sejauh mana identitas responden dalam penelitian. Oleh karena itu deskripsi identitas responden dalam penelitian ini dapat

dikelompokkan menjadi beberapa kelompok seperti : jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan usia responden.

Pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja di Kota Binjai). Dalam melaksanakan penelitian ini ditetapkan sebesar 65 orang responden yang dibagikan kuesioner mewakili beberapa SKPD di Kota Binjai namun hanya 60 kuesioner yang telah dikembalikan untuk dapat diolah lebih lanjut. Oleh karena itu akan disajikan deskripsi identitas yang dapat diuraikan sebagai berikut :

**a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis kelamin responden dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok yaitu kelompok pria dan wanita, untuk lebih jelasnya akan disajikan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3  
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Tanggapan Responden	
		Jumlah	Persentase %
1.	Pria	24	40%
2.	Wanita	36	60%
	Total	60	100%

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS versi 22, Penulis (2019)

Pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa mayoritas pegawai Dinas Pemerintahan Kota Binjai yang menjadi responden adalah berjenis kelamin wanita yaitu sebanyak 36 orang atau sebesar 60% dan responden berjenis kelamin pria yaitu sebanyak 24 orang atau sebesar 40%.



### b. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Tabel 4.4  
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

No.	Umur	Tanggapan Responden	
		Jumlah	Persentase %
1.	30 - 40 tahun	33	55%
2.	41 - 50 tahun	17	22,3%
3.	51 - 60 tahun	10	16,7%
Total		60	100%

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS versi 22, Penulis (2019)

Pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa mayoritas pegawai Dinas Pemerintahan Kota Binjai yang menjadi responden berumur 30 – 40 tahun yaitu sebanyak 33 orang atau sebesar 55%, responden berumur 41 - 50 tahun yaitu sebanyak 17 orang atau sebesar 22,3% dan responden berumur 51 - 60 tahun yaitu sebanyak 10 orang atau sebesar 16,7%.

### c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4.5  
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Pendidikan Terakhir	Tanggapan Responden	
		Jumlah	Persentase %
1.	SMA	8	13,3%
2.	D3	3	5,0%
3.	S1	40	66,7%
4.	S2	9	15,0%
Total		60	100%

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS versi 22, Penulis (2019)

Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa mayoritas pegawai Dinas Pemerintahan Kota Binjai yang menjadi responden berdasarkan pendidikan terakhir yaitu S1 sebanyak 40 orang atau sebesar 66,7%, pendidikan terakhir S2 sebanyak 9 orang atau sebesar 15,0%, pendidikan terakhir SMA sebanyak 8 orang atau sebesar 13,3% dan pendidikan terakhir D3 sebanyak 3 orang atau sebesar 5,0%.

#### d. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Tabel 4.6  
Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No.	Latar Belakang Pendidikan	Tanggapan Responden	
		Jumlah	Persentase %
1.	Akuntansi	18	30,0%
2.	Manajemen	11	18,3%
3.	MIPA	3	5,0%
4.	Lain-lain	28	46,7%
	Total	60	100%

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS versi 22, Penulis (2019)

Pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa mayoritas pegawai Dinas Pemerintahan Kota Binjai yang menjadi responden berdasarkan latar belakang pendidikan yaitu latar belakang pendidikan Lain-lain yaitu sebanyak 28 orang atau sebesar 46,7%, latar belakang pendidikan Akuntansi sebanyak 18 orang atau sebanyak 30,0%, latar belakang pendidikan Manajemen sebanyak 11 orang atau sebesar 18,3%, dan latar belakang pendidikan MIPA sebanyak 3 orang atau sebesar 5,0%.

#### e. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Tabel 4.7  
Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

No.	Lama Bekerja	Tanggapan Responden	
		Jumlah	Persentase %
1.	1 – 5 Tahun	24	40,0%
2.	6 – 10 Tahun	14	23,3%
3.	> 10 Tahun	22	36,7%
	Total	60	100%

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, Penulis (2019)

Pada tabel 4.7 dapat dilihat bahwa mayoritas pegawai Dinas Pemerintahan Kota Binjai yang menjadi responden lama bekerja 1 – 5 tahun, yaitu sebanyak 24 orang atau sebesar 40,0%, responden lama bekerja > 10 tahun yaitu sebanyak 22

orang atau sebesar 36,7%, dan responden lama bekerja 6 – 10 tahun yaitu sebanyak 14 orang atau sebesar 23,3%.

#### **4. Deskripsi Variabel Penelitian**

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel bebas yaitu sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah serta 1 (satu) variabel terikat yaitu nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Dalam penyebaran kuesioner, setiap variabel sebanyak 9 – 13 butir pernyataan yang harus di isi oleh responden yang berjumlah 60 orang. Jawaban kuesioner disediakan dalam 5 alternatif jawaban, yaitu:

- a. Sangat Setuju (SS) dengan skor 1
- b. Setuju (S) dengan skor 2
- c. Netral (N) dengan skor 3
- d. Tidak Setuju (TS) dengan skor 4
- e. Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 5

#### **5. Deskripsi Analisis Data**

##### **a. Pengujian Kualitas Data**

##### **1) Uji Validitas**

Syarat standar untuk memenuhi syarat apakah setiap pernyataan valid atau tidak, yaitu dengan cara membandingkan dengan  $r_{tabel} = 0,30$ . Apabila korelasi antara butir dalam pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid, sebaliknya jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , maka dinyatakan valid.

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas

No.	Variabel	Butir Pernyataan	Korelasi ( $r_{hitung}$ )	$r_{tabel}$	Keterangan
1.	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( $X_1$ )	Butir 1	0,514	0,30	Valid
		Butir 2	0,612	0,30	Valid
		Butir 3	0,521	0,30	Valid
		Butir 4	0,546	0,30	Valid
		Butir 5	0,458	0,30	Valid
		Butir 6	0,589	0,30	Valid
		Butir 7	0,592	0,30	Valid
		Butir 8	0,707	0,30	Valid
		Butir 9	0,639	0,30	Valid
2.	Pengawasan Keuangan Daerah ( $X_2$ )	Butir 1	0,686	0,30	Valid
		Butir 2	0,676	0,30	Valid
		Butir 3	0,794	0,30	Valid
		Butir 4	0,305	0,30	Valid
		Butir 5	0,689	0,30	Valid
		Butir 6	0,734	0,30	Valid
		Butir 7	0,701	0,30	Valid
		Butir 8	0,736	0,30	Valid
		Butir 9	0,664	0,30	Valid
		Butir 10	0,664	0,30	Valid
		Butir 11	0,806	0,30	Valid
		Butir 12	0,751	0,30	Valid
		Butir 13	0,621	0,30	Valid
3.	Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah ( $Y$ )	Butir 1	0,655	0,30	Valid
		Butir 2	0,695	0,30	Valid
		Butir 3	0,713	0,30	Valid
		Butir 4	0,812	0,30	Valid
		Butir 5	0,565	0,30	Valid
		Butir 6	0,785	0,30	Valid
		Butir 7	0,719	0,30	Valid
		Butir 8	0,671	0,30	Valid
		Butir 9	0,676	0,30	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 22, Penulis (2019)

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 4.8 bahwa masing-masing item pernyataan dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid karena nilai korelasi ( $r_{hitung}$ ) lebih besar dibandingkan dengan nilai  $r_{tabel}$ .

## 2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui adanya konsisten alat ukur dalam penggunaannya. Dengan kata lain, untuk mengetahui kestabilan dan konsisten responden dalam menjawab butir-butir yang berkaitan dengan pernyataan yang disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Reliabilitas suatu variabel dapat dikatakan baik apabila memiliki nilai *Cronbach's alpha* yang lebih besar ( $>$ ) 0,60.

Tabel 4.9  
Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Batas Reliabilitas	Keterangan
1.	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X1)	0,737	0,60	Reliabel
2.	Pengawasan Keuangan Daerah (X2)	0,762	0,60	Reliabel
3.	Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Y)	0,769	0,60	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 22, Penulis (2019)

Berdasarkan tabel 4.9 diatas menunjukkan bahwa konstruk pernyataan *Cronbach's Alpha* persepsi mengenai sistem pengendalian intern pemerintah (X<sub>1</sub>) sebesar  $0,737 > 0,60$  bahwa pernyataan yang telah disajikan kepada responden menyatakan *reliabel* atau handal, konstruk pernyataan pengawasan keuangan daerah (X<sub>2</sub>) sebesar  $0,762 > 0,60$  menyatakan *reliabel* atau handal.

Konstruk pernyataan nilai informasi laporan keuangan pemerintah (Y) *Cronbach's Alpha* sebesar  $0,769 > 0,60$  menyatakan *reliabel* atau handal.

### b. Pengujian Asumsi Klasik

Syarat untuk menghasilkan model regresi yang baik maka diperlukan asumsi klasik agar hasil pengujian bersifat tidak bias dan dapat diterima secara

ekonometrik. Pengujian asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolonieritas. Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS 22 setelah dilakukan transformasi data maka didapatkan hasil uji klasik seperti yang dijelaskan dibawah ini :

### 1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik yaitu memiliki data terdistribusi normal. Data yang normal ialah keharusan dan merupakan syarat yang harus dipenuhi. Uji normalitas data untuk penelitian ini menggunakan uji *One Sample Komogrov – Smirnov Test*.

Tabel 4.10  
Hasil Uji Normalitas Data  
*One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,39466969
Most Extreme Differences	Absolute	,103
	Positive	,069
	Negatif	-,103
Kolmogorov-Smirnov Z		,103
Asymp. Sig. (2-tailed)		,185 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal		
b. Calculated from data		
c. Lilliefors Significance Correction		

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 22, Penulis (2019)

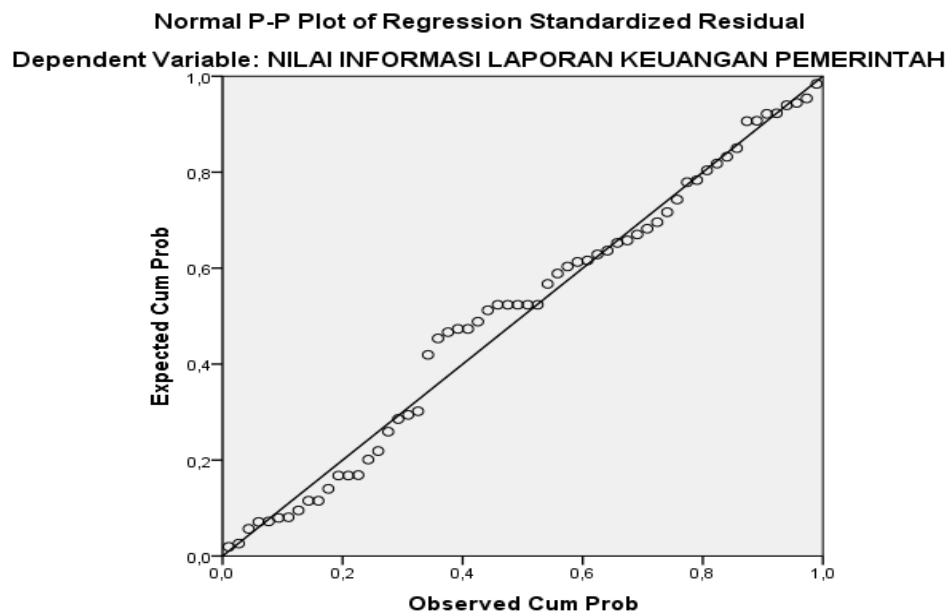
#### a) Dengan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

Berdasarkan tabel 4.10 diatas dengan menggunakan *kolmogorov-smirnov z* sebesar 0,103 dan nilai asymp. sig. sebesar 0,185. Berdasarkan hasil keputusan bahwa nilai asymp. sig. perlu dibagi 2 sehingga  $0,185/2 = 0,0925$  yang kemudian tingkat signifikan pun dibagi 2 yaitu  $0,06/2 = 0,03$  dan hasilnya dapat disimpulkan

bahwa  $0,0925 > 0,03$  sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi data residual normal.

## b) Dengan P-P Plot

Gambar 4.1 P-P Plot Uji Normalitas



Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS versi 22, Penulis (2019)

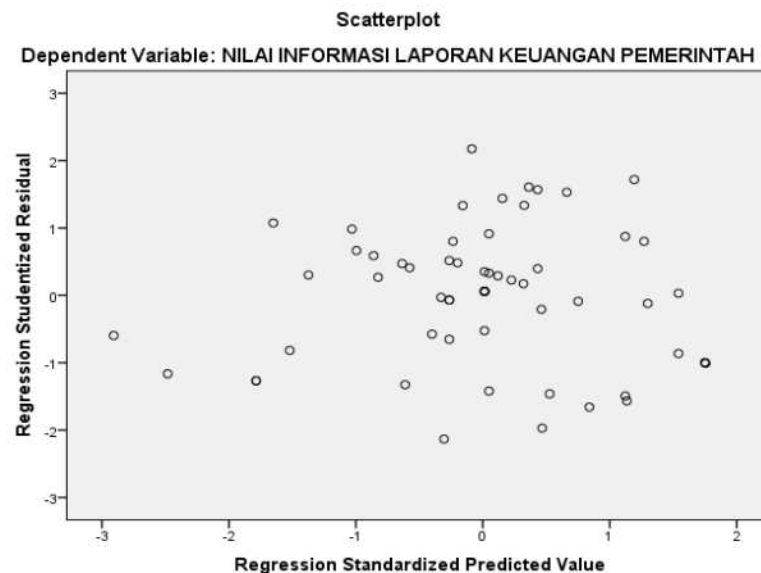
Berdasarkan gambar 4.1 untuk hasil pengujian normalitas dengan menggunakan gambar P-P Plot terlihat titik-titik diatas yang menyebar disekitar garis diagonal, sehingga data telah berdistribusi secara normal.

## 2) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah model yang terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap atau disebut homokedastisitas. Untuk mengetahui terjadi atau tidak heteroskedastisitas dalam

model regresi penelitian ini, dapat digunakan metode grafik pilot antara lain prediksi variabel terikat dengan residualnya.

Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS versi 22, Penulis (2019)

Berdasarkan gambar diatas, gambar *Scatterplot*, menunjukkan bahwa titik-titik yang dihasilkan menyebar secara acak ataupun dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola atau trend garis tertentu, sehingga model ini layak untuk dipakai.

### 3) Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Ada tidaknya masalah multikolonieritas dalam sebuah model regresi dapat dideteksi dengan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai toleransi (*tolerance*). Apabila nilai toleransi ( $>$ ) 1,10 dan nilai VIF ( $<$ ) 10 maka disimpulkan terbebas dari multikolonieritas.



Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients <sup>a</sup>		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	,961	1,040
Pengawasan Keuangan Daerah	,961	1,040

a. Dependent Variable : Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 22, Penulis (2019)

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas pada tabel 4.11 dapat diketahui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebesar  $0,961 > 0,10$ , variabel Pengawasan Keuangan Daerah sebesar  $0,961 > 0,10$  sedangkan angka *Variance Inflation Factor* (VIF) yang memiliki nilai lebih kecil dari 10, antara lain Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  $1,040 < 10$  dan Pengawasan Keuangan Daerah  $1,040 < 10$  sehingga tidak terjadi multikolonieritas.

### c. Pengujian Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pola atau bentuk pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat secara bersama-sama.

Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandadized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
		B	Std Error	Beta		
1	(Constant)	5,799	2,847		2,037	,046
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	,563	,136	,479	4,128	,000
2	Pengawasan Keuangan Daerah	,072	,074	,113	,971	,336

a. Dependent Variable : Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, Penulis (2019)

Berdasarkan tabel 4.12 diatas diperoleh model persamaan regresi linier berganda dengan menggunakan rumus yaitu :

$$Y = 5,799 + (0,563)X_1 + (0,072)$$

Adapun interpretasi dari persamaan diatas adalah :

- 1) Jika segala pada variabel-variabel independen dianggap konstan maka Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Y) adalah sebesar 5,799 satuan ceteris paribus.
- 2) Jika Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ditingkatkan 1 satuan maka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Y) meningkat sebesar 0,563 satuan ceteris paribus.
- 3) Jika Pengawasan Keuangan Daerah ditingkatkan 1 satuan maka Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Y) menurun sebesar 0,072 satuan ceteris paribus.

#### **d. Pengujian Hipotesis**

##### **1) Uji Signifikan Simultan (Uji F)**

Uji signifikan simultan bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang terdiri dari sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Cara yang digunakan adalah dengan melihat *level of significant* (0,05). Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima.

Tabel 4.13 Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA <sup>b</sup>					
Model	Sun of Square	Df	Mean Square	F	Sig
Regression	242,830	2	121,415	10,179	,000 <sup>b</sup>
Residual	679,903	57	11,928		
Total	922,733	59			
a. Dependent Variable: Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah					
b. Predictors: (Constant), Pengawasan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah					

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 22, Penulis (2019)

Berdasarkan uji simultan pada tabel 4.13 diatas menyatakan perhitungan uji F dapat diketahui bahwa nilai  $F_{hitung}$  adalah  $10,179 > F_{tabel} 2$  dengan signifikan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( $X_1$ ), Pengawasan Keuangan Daerah ( $X_2$ ) secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas yang diprosikan dengan Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah ( $Y$ ).

## 2) Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji signifikan parsial bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Uji ini dilakukan untuk melihat pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah secara parsial terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Variabel berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah ketika signifikan  $< 0,05$ .

Tabe 4.14 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandatized Coefficients		Standartized Coefficient	T	Sig
	B	Std Error	Beta		
(Constant)	5,799	2,847		2,037	,046
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	,563	,136	,479	4,128	,000
Pengawasan Keuangan Daerah	,072	,074	,113	,971	,336

a. Dependent Variabel : Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 22, Penulis (2019)

Berdasarkan tabel 4.14 diatas terbukti bahwa variabel sistem pengendalian intern pemerintah ( $X_1$ ) dan pengawasan keuangan daerah ( $X_2$ ) berpengaruh dengan dengan nilai informasi laporan keuangan pemerintah ( $Y$ ).

Berikut ini dijelaskan hasil perhitungan uji t masing-masing variabel :

- a) Pengujian hipotesis sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah. sistem pengendalian intern pemerintah sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan sistem pengendalian intern pemerintah lebih kurang dari 0,05. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hipotesis akan diterima jika nilai signifikan lebih kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 diterima, berarti sistem pengendalian intern pemerintah memiliki pengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah.
- b) Pengujian hipotesis pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Nilai signifikan variabel pengawasan keuangan daerah sebesar 0,336. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan pengawasan keuangan daerah lebih kurang dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa hipotesis ke 2 diterima, berarti pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah.

### 3) Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengukur seberapa jumlah kemampuan model dalam memvariasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi diantaranya adalah nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan antar variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas.

Tabel 4.15 Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,513 <sup>a</sup>	,263	,237	3,45371
a. Predictors : (Constant), Pengawasan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah				
b. Dependent Variable : Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah				

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 22, Penulis (2019)

Berdasarkan hasil diatas dapat dilihat bahwa angka *R Square* 0,263 yang dapat disebut koefisien determinasi yang dalam hal ini berarti 26,3% hasil pilihan nilai informasi laporan keuangan pemerintah, dapat diperoleh dan dijelaskan oleh sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah sedangkan sisanya  $100\% - 26,3\% = 73,7\%$  dijelaskan oleh faktor lain atau variabel diluar model.

## B. Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian.

Hasil pembahasan lebih lanjut akan diuraikan dalam poin berikut ini :

1. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah

Dari hasil pengujian hipotesis, ditemukan adanya bukti menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian intern pemerintah dengan nilai informasi laporan keuangan pemerintah dan hubungannya positif. Pengaruh antara sistem pengendalian intern pemerintah dengan nilai informasi laporan keuangan pemerintah adalah semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka nilai informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula.

Pengendalian intern pemerintah merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*) serta melindungi sumber daya organisasi. Salah satu tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif adalah agar laporan keuangan reliabel.

Pengendalian intern menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini sejalan dengan Armando (2013), Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Informasi Laporan

Keuangan. Dapat dilihat dari variabel sistem pengendalian intern pemerintah ( $X_1$ ) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah (Y) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Binjai. Terlihat dari nilai signifikannya yaitu ( $0,000 < 0,05$ ). Variabel sistem pengendalian intern pemerintah, dimana tingkat capaian responden rata-rata untuk variabel sistem pengendalian intern pemerintah berada pada kategori sangat baik.

## 2. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah

Dari hasil pengujian hipotesis, ditemukan adanya bukti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan keuangan daerah dengan nilai informasi laporan keuangan pemerintah dan hubungannya positif. Pengaruh antara pengawasan keuangan daerah dengan nilai informasi laporan keuangan daerah dengan nilai informasi laporan keuangan pemerintah adalah semakin baik pengawasan keuangan daerah maka nilai informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula.

Sistem akan berjalan baik apabila ada pengawasan yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana, untuk mendukung kualitas laporan keuangan yang baik. Maka oleh sebab itu perlu adanya suatu pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut agar semua proses dapat berjalan dengan baik sehingga akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi (2014), Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Nilai Informasi Keuangan. Dapat dilihat dari data variabel pengawasan keuangan daerah, dimana tingkat capaian responden rata-rata

untuk variabel pengawasan keuangan daerah berada pada kategori baik, dari variabel pengawasan keuangan daerah ( $X_2$ ) secara parsial terlihat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah (Y) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Binjai. Terlihat dari nilai signifikannya yaitu sebesar  $0,336 < 0,005$ ).

Dari penelitian yang dilakukan ada beberapa informasi yang didapat berkenaan dengan judul skripsi ini dengan rumusan masalah “Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Binjai?”.

- a. Mengapa Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) Kota Binjai Tahun 2014 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas ?

Karena, menurut opini BPK, Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah Kota Binjai telah wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan pemerintah Kota Binjai tanggal 31 Desember 2014, realisasi anggaran dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam Catatan atas laporan keuangan Nomor D.4.3.10, kebijakan akuntansi pemerintah kota binjai menyatakan bahwa pemberlakuan penyusutan aset tetap dilaksanakan dalam penyusunan laporan keuangan Tahun 2015, sehingga penyajian Aset Tetap per 31 Desember 2014 belum dikurangi dengan penyusutan.

Standar Akuntansi Pemerintah pada lampiran D.08, Pernyataan Nomor 07 Akuntansi Aset Tetap juga menyatakan bahwa entitas pelaporan dapat memulai



pemberlakuan penyusutan aset tetap paling lama empat tahun setelah TA 2010. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

b. Mengapa Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) Kota Binjai Tahun 2015 mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian ?

Karena, pemerintah Kota Binjai belum melakukan pemutakhiran dan validasi data piutang PBB-P2 Badan Pengawasan Keuangan tidak dapat memperoleh bukti yang lengkap atas posisi 31 Desember 2015, karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait. Sehingga, Badan Pengawasan Keuangan tidak dapat menyakini kewajaran penyajian piutang PBB-P2. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.3.1.1.3 atas laporan keuangan, Pemerintah Kota Binjai menyajikan nilai persediaan per 31 Desember 2015.

Nilai persediaan tersebut belum menunjukkan nilai yang wajar, karena pengurus/penyimpan barang satuan kerja tidak membuat catatan mutasi persediaan, tidak melaporkan semua barang habis pakai, dan tidak mencatat beban persediaan obat secara perpetual. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.3.1.3 atas laporan keuangan, pemerintah Kota Binjai menyajikan nilai aset tetap per 31 Desember 2015 dan beban penyusutan TA 2015. Dari nilai tersebut, diantaranya aset tanah disajikan belum termasuk aset tanah dibawah ruas jalan dan bangunan air, irigasi dan drainase, aset jalan pemeliharaan dicatat mendahului perolehan awal aset induk, dan aset tetap lainnya belum disusutkan.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah adalah

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pada pemerintah Kota Binjai. Dimana semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka semakin baik pula nilai informasi laporan keuangan pemerintah Kota Binjai.
2. Penerapan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pada pemerintah Kota Binjai. Dimana semakin baik penerapan pengawasan keuangan daerah maka semakin baik pula nilai informasi laporan keuangan pemerintah Kota Binjai.

#### **B. Saran**

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa dari hasil penelitian ini terlihat bahwa

1. Sistem pengendalian intern dalam pemerintahan telah baik dilakukan, tapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini berdampak pada nilai informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah. Pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai sistem pengendalian intern pemerintah terutama pada aspek pencatatan penyusutan aset tetap.

2. Pengawasan keuangan daerah juga telah baik dilakukan. Agar nilai yang dihasilkan laporan keuangan dari pemerintah dapat terus ditingkatkan. Pemerintah sebaiknya juga melakukan pengkajian ulang mengenai pengawasan keuangan daerah karena belum juga melakukan pemutakhiran dan validasi data piutang yang belum lengkap.
3. Penelitian ini masih terbatas pada sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap nilai informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah.
4. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti wawancara langsung, metode survei lapangan, dll. Sebagai bahan tambahan referensi jika ingin meneliti kembali dalam judul yang sama atau melengkapi dan menambah variabelnya dilokasi yang sama maupun berbeda.
5. Bagi Universitas diharapkan dengan adanya hasil penelitian penulis tentang pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah, pihak kampus dapat mengarsipkannya ke perpustakaan agar memperluas pengetahuan para pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andika, R. (2018). Pengaruh Kemampuan Berwirausaha dan Kepribadian Terhadap Pengembangan Karir Individu Pada Member PT. Ifaria Gemilang (IFA) Depot Sumatera Jaya Medan. *JUMANT*, 8(2), 103-110.
- Andika, R. (2018). PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI DAN PENGAWASAN TERHADAP DISIPLIN KERJA KARYAWAN PADA PT ARTHA GITA SEJAHTERA MEDAN. *JUMANT*, 9(1), 95-103.
- Ahmad, R. (2019). PENGARUH KARAKTERISTIK PEKERJAAN DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. MITRA NIAGA SEJATI JAYA-LANGKAT. *JUMANT*, 11(2), 137-146.
- Antarasumut. 2016. BPK : Pemkot Binjai Raih WDP LKPD 2015. <https://sumut.antaranews.com/berita/158386/bpk-pemkot-binjai-raih-wdp-lkpd-2015>. Diakses tanggal 25 Mei 2016.
- Armando, Gery. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada SKPD di Kota Bukittinggi). *Jurnal*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Aspan, H. (2020). "The Role of Legal History in the Creation of Aspirational Legislation in Indonesia". *International Journal of Research and Review (IJRR)*, Volume 7 Issue 6, pp 40-47.
- Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.
- BPK RI. 2015. LKPD Kota Binjai Tahun 2014 – *Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas*. <http://medan.bpk.go.id/?p=18659>. Diakses tanggal 3 Juni 2015.
- BPK RI. 2016. *LKPD Kota Binjai Tahun 2015 – Wajar Dengan Pengecualian*. <http://medan.bpk.go.id/?p=18663>. Diakses tanggal 3 Juni 2016.
- BPKP. 2015. Pemko Binjai Bertekad Perbaiki Kualitas Opinions. <http://www.bpkp.go.id/berita/read/13724/0/Pemko-Binjai-Bertekad-Perbaiki-Kualitas-Opinions.bpkp>. Diakses tanggal 6 Februari 2015.

- Dewi, Komang Sartika. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). *Jurnal*. Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha.
- Elfridaini, Siti Chairiyah. 2018. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Akseibilitas Laporan Keuangan dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Seluruh Dinas Instansi Pemerintah Kota Binjai. *Skripsi*. Fakultas Sosial Sains. Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- El Fikri, M., & Dewi Nurmasari Pane, R. A. (2020). Factors Affecting Readers' Satisfaction in "Waspada" Newspapers: Insight from Indonesia. Indexing and Abstracting.
- Pane, D. N., El Fikri, M., & Siregar, N. (2020). UPAYA PENINGKATAN REPURCHASE INTENTION MELALUI SOSIAL MEDIA DAN WORD OF MOUTH TERHADAP HOTEL PARBABA BEACH DI DAERAH PARIWISATA KABUPATEN SAMOSIR. *JUMANT*, 12(1), 12-20.
- Fadly, Y. (2019). PERFORMA MAHASISWA AKUNTANSI DALAM IMPLEMENTASI ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE (ESP) DI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI (UNPAB) MEDAN.
- Fajrin, Ferawati. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Kabupaten Padang Pariaman). *Jurnal*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Marpaung, Friska. 2019. Pengaruh Pemungutan Retribusi Parkir dan Pelayanan Parkir terhadap Kinerja Badan Pengelola Perparkiran di Kecamatan Medan Helvetia. *Skripsi*. Fakultas Sosial Sains. Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Pane, D. N., El Fikri, M., & Siregar, N. (2020). UPAYA PENINGKATAN REPURCHASE INTENTION MELALUI SOSIAL MEDIA DAN WORD OF MOUTH TERHADAP HOTEL PARBABA BEACH DI DAERAH PARIWISATA KABUPATEN SAMOSIR. *JUMANT*, 12(1), 12-20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ritonga, H. M., Hasibuan, H. A., & Siahaan, A. P. U. (2017). Credit Assessment in Determining The Feasibility of Debtors Using Profile Matching. *International Journal of Business and Management Invention*, 6(1), 73079.

RITONGA, H. M., PANE, D. N., & RAHMAH, C. A. A. (2020). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN EMOSIONAL TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA HONDA IDK 2 MEDAN. *JUMANT*, 12(2), 30-44.

Ritonga, H. M., Setiawan, N., El Fikri, M., Pramono, C., Ritonga, M., Hakim, T., ... & Nasution, M. D. T. P. (2018). Rural Tourism Marketing Strategy And Swot Analysis: A Case Study Of Bandar PasirMandoge Sub-District In North Sumatera. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(9).

Silfiana. 2015. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

## **KUESIONER PENELITIAN**

### **PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP NILAI INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Binjai)**

Yth. Bapak/Ibu Responden

Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini dibuat untuk meneliti “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Binjai)”. Informasi Bapak/Ibu sangat berguna bagi penelitian ini, karena Bapak/Ibu adalah orang yang tepat untuk mengutarakan pengalaman dan pendapat mengenai hal ini. Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan dengan jujur dan benar.

Sesuai dengan kode etik penelitian, jawaban Bapak/Ibu akan saya jaga kerahasiaannya. Atas waktu dan kerja sama Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Peneliti,

**NURBAIDAH HANUM**



## LEMBAR KUESIONER

### A. IDENTITAS RESPONDEN

Mohon kesediaan Bapak/Ibu mengisi daftar berikut:

1. Nama : .....
2. Jenis Kelamin :  Pria  Wanita
3. Umur : ..... Tahun
4. Nama SKPD : .....
5. Pendidikan Terakhir :  SMA  D3  S1  S2  S3
6. Latar Belakang Pendidikan :  Akuntansi  Manajemen  
 Pertanian  MIPA  
 Lain-lain (.....)
7. Lama Bapak/Ibu bekerja di SKPD ini :  1-5th  6-10th  >10th

## B. DAFTAR PERTANYAAN

### 1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda *check list* (✓) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat dari Bapak/Ibu.

**SS** = Sangat Setuju

**TS** = Tidak Setuju

**S** = Setuju

**STS** = Sangat Tidak Setuju

**N** = Netral

NO	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
<b>Lingkungan Pengendalian</b>						
1	Instansi/lembaga tempat Bapak/Ibu bekerja telah menerapkan kode etik secara tertulis					
2	Pimpinan Instansi/lembaga di tempat Bapak/Ibu bekerja telah memberikan contoh dalam berperilaku mengikuti kode etik					
<b>Penilaian Resiko</b>						
3	Ditempat Bapak/Ibu bekerja telah menerapkan penentuan batas dan penentuan toleransi					
4	Ditempat Bapak/Ibu bekerja telah menerapkan pengendalian intern dan manajemen terhadap resiko					
<b>Kegiatan Pengendalian</b>						
5	Setiap transaksi dan aktivitas ditempat Bapak/Ibu bekerja telah didukung dengan otorisasi dari pihak yang berwenang					
6	Ditempat Bapak/Ibu bekerja telah menerapkan pemisahan tugas yang memadai					
<b>Informasi dan Komunikasi</b>						
7	Ditempat Bapak/Ibu bekerja telah menerapkan sistem informasi untuk melaksanakan tanggung jawab					

8	Ditempat Bapak/Ibu bekerja telah melaksanakan sistem akuntansi yang memungkinkan audit					
<b>Pemantauan</b>						
9	Dalam waktu yang tidak ditentukan pimpinan melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi					

## 2. Pengawasan Keuangan Daerah

Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda *check list* (✓) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat dari Bapak/Ibu.

SS = Sangat Setuju      TS = Tidak Setuju  
S = Setuju                STS = Sangat Tidak Setuju  
N = Netral

NO	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
<b>Persiapan Pengawasan</b>						
1	Bapak/Ibu melakukan pengumpulan informasi mengenai obyek/sasaran yang akan diperiksa sebelum melakukan pemeriksaan terhadap keuangan daerah					
2	Bapak/Ibu terlebih dahulu memahami dan mempelajari peraturan perundang-undangan sebelum melakukan pengawasan					
3	Sebelum melakukan pengawasan Bapak/Ibu menyusun suatu Program Kerja Pemeriksaan (PKP) sebagai pedoman pengawasan					
<b>Pelaksanaan Pengawasan</b>						
4	Bapak/Ibu melakukan pembicaraan pendahuluan dengan pimpinan obyek yang diperiksa sebelum melakukan pemeriksaan					

5	Bapak/Ibu melakukan pemeriksaan terhadap obyek pengawasan keuangan daerah secara terperinci					
6	Bapak/Ibu memberikan surat teguran/surat perintah penertiban kepada tiap dinas/instansi yang terbukti melakukan penyimpangan					
<b>Penyusunan Laporan</b>						
7	Bapak/Ibu melakukan persentasi dari hasil pemeriksaan antar anggota tim pemeriksa					
8	Bapak/Ibu melakukan nota dinas pengantar hasil pemeriksaan					
9	Bapak/Ibu membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai hasil akhir dari hasil pemeriksaan tersebut					
<b>Penunjang Proses Pengawasan</b>						
10	Bapak/Ibu mendapatkan DIKLAT (Pendidikan dan Latihan) sebelum menjadi tim pengawasan/pemeriksa					
11	Bapak/Ibu sebelum melakukan pengawasan membentuk dan dibagi menjadi beberapa tim pemeriksa ke setiap dinas/instansi					
12	Bapak/Ibu dalam melakukan pengawasan memberlakukan target waktu terhadap para anggota pemeriksa					
13	Bapak/Ibu memperhatikan pengaduan dari masyarakat dalam memberlakukan target pemeriksaan					

### 3. Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah

Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda *check list* (✓) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat dari Bapak/Ibu.

**SS** = Sangat Setuju      **TS** = Tidak Setuju  
**S** = Setuju                **STS** = Sangat Tidak Setuju  
**N** = Netral

NO	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
<b>Relevan</b>						
1	Laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi/lembaga tempat Bapak/Ibu bekerja memberikan informasi yang dapat mengoreksi ekspektasi di masa lalu					
2	Instansi/lembaga tempat Bapak/Ibu bekerja menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu					
3	Instansi/lembaga tempat Bapak/Ibu bekerja menyajikan laporan keuangan secara lengkap					
<b>Andal</b>						
4	Transaksi yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat Bapak/Ibu bekerja tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan					
5	Informasi yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat Bapak/Ibu bekerja bebas dari kesalahan yang bersifat material					
6	Instansi/lembaga tempat Bapak/Ibu bekerja menyajikan informasi yang diarahkan untuk kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan khusus					
7	Ditempat Bapak/Ibu bekerja, informasi keuangan yang dihasilkan dapat diuji					

<b>Dapat dibandingkan</b>					
8	Informasi keuangan yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat Bapak/Ibu bekerja dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya				
<b>Dapat dipahami</b>					
9	Informasi keuangan yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat Bapak/Ibu bekerja dapat dipahami oleh pengguna				

## LAMPIRAN WAWANCARA

**a. Mengapa Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) Kota Binjai Tahun 2014 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas ?**

Karena, menurut opini BPK, Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah Kota Binjai telah wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan pemerintah Kota Binjai tanggal 31 Desember 2014, realisasi anggaran dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam Catatan atas laporan keuangan Nomor D.4.3.10, kebijakan akuntansi pemerintah kota binjai menyatakan bahwa pemberlakuan penyusutan aset tetap dilaksanakan dalam penyusunan laporan keuangan Tahun 2015, sehingga penyajian Aset Tetap per 31 Desember 2014 belum dikurangi dengan penyusutan.

Standar Akuntansi Pemerintah pada lampiran D.08, Pernyataan Nomor 07 Akuntansi Aset Tetap juga menyatakan bahwa entitas pelaporan dapat memulai pemberlakuan penyusutan aset tetap paling lama empat tahun setelah TA 2010. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

**b. Mengapa Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) Kota Binjai Tahun 2015 mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian ?**

Karena, pemerintah Kota Binjai belum melakukan pemutakhiran dan validasi data piutang PBB-P2 Badan Pengawasan Keuangan tidak dapat memperoleh bukti yang lengkap atas posisi 31 Desember 2015, karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait. Sehingga, Badan Pengawasan Keuangan tidak dapat menyakini kewajaran penyajian piutang PBB-P2. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.3.1.1.3 atas laporan keuangan, Pemerintah Kota Binjai menyajikan nilai persediaan per 31 Desember 2015.

Nilai persediaan tersebut belum menunjukkan nilai yang wajar, karena pengurus/penyimpan barang satuan kerja tidak membuat catatan mutasi persediaan, tidak melaporkan semua barang habis pakai, dan tidak mencatat beban persediaan obat secara perpetual. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.3.1.3 atas laporan keuangan, pemerintah Kota Binjai menyajikan nilai aset tetap per 31 Desember 2015 dan beban penyusutan TA 2015. Dari nilai tersebut, diantaranya aset tanah disajikan belum termasuk aset tanah dibawah ruas jalan dan bangunan air, irigasi dan drainase, aset jalan pemeliharaan dicatat mendahului perolehan awal aset induk, dan aset tetap lainnya belum disusutkan.

Diketahui oleh,

Inspektorat Daerah Kota



### TABULASI DATA KUESIONER

#### 1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X1)

No	Jenis Kelamin	Umur	Nama SKPD	Pendidikan terakhir	Latar Belakang Pendidikan	Lama Bekerja di SKPD	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	TOTAL
1	1	2	1	3	3	1	2	2	2	2	3	3	3	2	3	22
2	1	2	1	4	5	3	1	2	2	2	2	3	2	2	3	19
3	2	1	1	3	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
4	2	2	1	3	5	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	19
5	2	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
6	2	1	1	3	4	1	1	2	2	2	2	3	2	1	2	17
7	2	3	1	3	5	2	1	2	2	2	2	2	2	2	3	18
8	2	2	1	4	5	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3	20
9	1	2	1	3	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	16
10	2	2	1	3	5	2	1	2	2	2	2	3	2	2	3	19
11	1	1	1	3	5	2	2	2	2	2	2	4	3	3	3	23
12	2	1	1	3	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	3	14
13	2	2	1	3	3	1	2	3	2	2	2	2	2	2	3	20
14	2	1	1	4	1	3	1	2	2	2	2	2	2	1	2	16
15	1	1	1	4	1	1	2	3	3	3	3	2	2	2	2	22
16	2	1	1	4	1	2	1	2	2	2	2	3	1	2	3	18
17	1	1	1	3	1	3	2	2	4	2	2	2	4	2	4	24
18	2	1	1	3	1	2	2	2	2	2	3	3	2	3	3	22
19	2	1	1	4	1	1	2	2	3	2	3	3	2	2	3	22
20	2	3	2	2	5	1	4	2	2	4	1	2	2	2	2	21
21	2	1	2	3	3	1	4	2	2	4	1	1	1	2	2	19
22	2	3	1	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
23	1	3	3	3	5	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	12
24	2	1	3	3	1	1	2	2	2	1	1	2	3	2	4	19
25	1	3	4	1	5	3	1	2	2	2	1	2	2	2	2	16
26	2	1	4	4	5	3	2	2	2	1	1	1	1	1	2	13
27	1	3	5	1	5	3	2	1	2	2	2	2	2	2	2	17
28	2	1	5	1	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
29	2	1	6	3	3	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	11
30	2	1	6	3	3	3	1	1	1	1	2	2	1	1	1	11

